

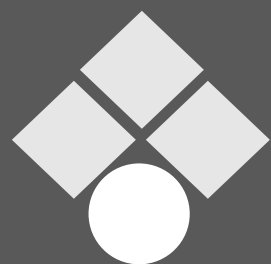


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**TAHUN 2021 -
2026**



**DINAS
PERUMAHAN
RAKYAT,
KAWASAN
PERMUKIMAN,
PERTANAHAN,
DAN TATA RUANG
KABUPATEN
SRAGEN**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Renstra pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahunan.

Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen memuat beberapa tuntutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Lebih lanjut Rencana Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang diturunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen. Semoga ke depan dokumen Renstra yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Sragen.

Sragen, 16 Maret 2022

PLT KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN SRAGEN



R. SUPARWOTO, S.STP., M.Si.
NIP. 19780710 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Bagan dan Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1. Tujuan.....	44
4.2. Sasaran.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VIII PENUTUP.....	81

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

		Hal.
Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.....	13
Tabel 1	Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen (PNS dan Non PNS).....	14
Tabel 2	Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Menurut Golongan.....	15
Tabel 3	Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Menurut Pendidikan.....	15
Tabel 4	Daftar Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.....	16
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen 2017 – 2021.....	19
Tabel 6	Target dan Realisasi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021.....	23
Tabel 7	Review Capaian Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2017 - 2021.....	30
Tabel 8	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2017 - 2021.....	34
Tabel 9	Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 – 2024.....	41
Tabel 10	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026.....	45
Tabel 11	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,	53

	Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2022 – 2026.....	
Tabel 12	Target Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2022 – 2026.....	77
Tabel 13	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati Sragen dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sragen dalam RPJPD Tahun 2021-2026 yaitu “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong” dan misi ke 4 (empat) “Menangani Kemiskinan, Memperluas Kesempatan Kerja” serta misi ke 5 (lima) “Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen mengacu kepada RPJMD Kabupaten

Sragen dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PUSDATARU). Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

- Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
 19. Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 050/041/034/2021 tanggal 25 Januari Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Bupati Sragen yang memuat arah kebijakan teknis dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.
2. Menyediakan dokumen rencana kerja Tahun 2021-2026 di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen pada Tahun 2021-2026.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra Dinas dengan dokumen perencanaan lainnya, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 meliputi rencana sasaran, target capaian kinerja, pagu indikatif serta sumber dananya.
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antar bidang teknis dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.
3. Mewujudkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Struktur OPD, tugas dan fungsi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Strategi dan Kebijakan OPD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana dan program OPD serta pendanaan yang merujuk pada tiap tujuan dan sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Indikator kinerja OPD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana strategis, disertai dengan harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen merupakan Dinas tipe B yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.

4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi OPD

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen serta Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan
 - a. Kelompok Unsur Fasilitas Penyediaan Rumah.
 - b. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan.
 - c. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman.
 - b. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
 - c. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
 - a. Seksi Pertanahan.
 - b. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang.
 - c. Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang.

Secara garis besar uraian tugas dan fungsi per unit kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan

tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.

(2) Fungsi Sekretariat :

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 4) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Perumahan

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Adapun fungsi Bidang Perumahan adalah :
 - 1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Kawasan Permukiman
- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - (2) Adapun fungsi Bidang Kawasan Permukiman adalah :
 - 1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan

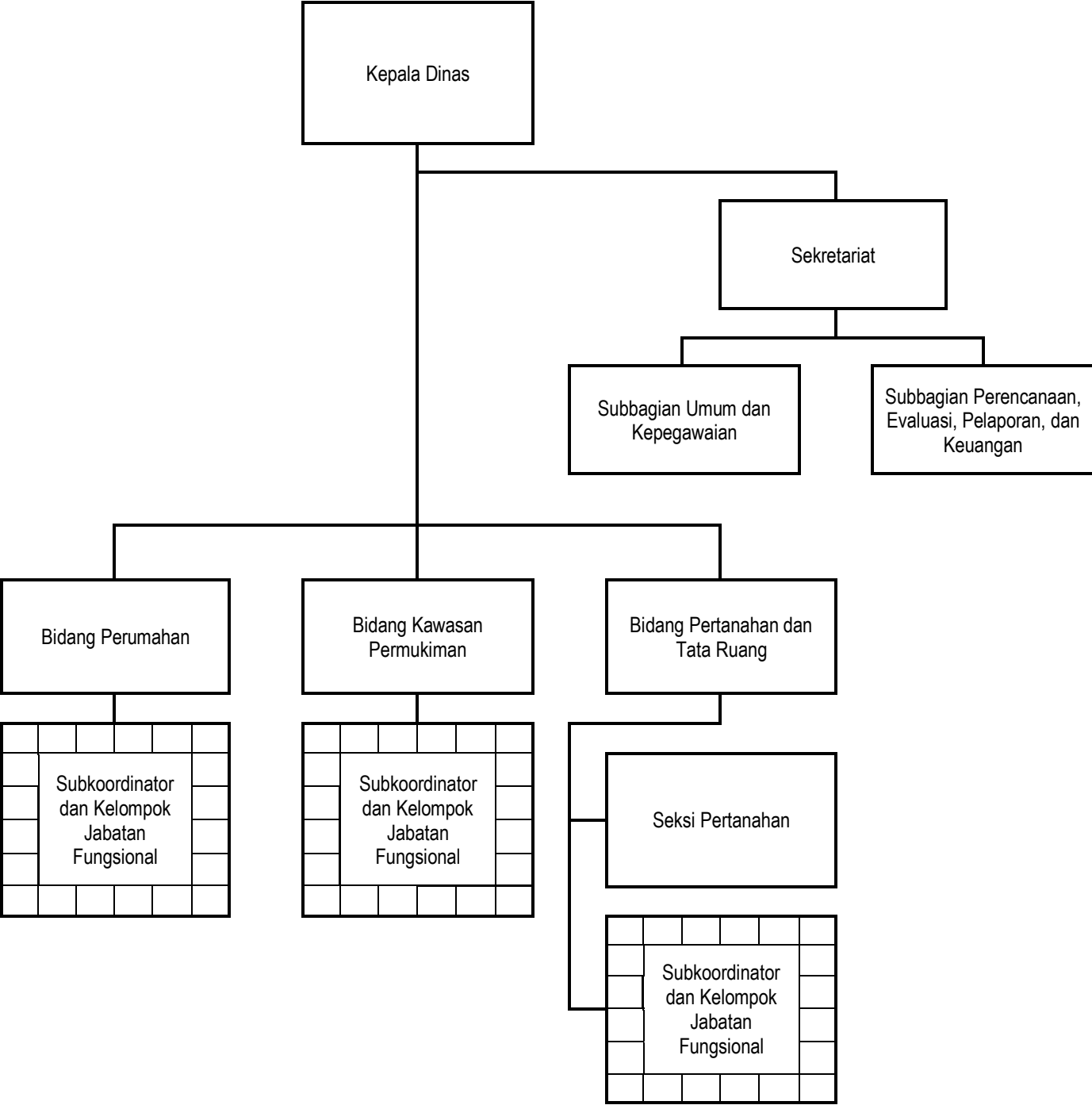
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

- (1) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
- (2) Adapun fungsi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang adalah :
 - 1) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang per akhir September 2021 sejumlah 81 (delapan puluh satu) orang ASN dengan perincian sebagai berikut :

2.2.1. Potensi Kepegawaian

Tabel 1
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen
(PNS dan Non PNS)

SDM PNS					
No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1.	Kepala Dinas	1			
2.	Sekretaris	1			
3.	Kepala Bidang	3			
4.	Kepala Sub Bagian	1	1		
5.	Kepala Seksi		1		
6.	Fungsional Umum	-	24	28	3
	Jumlah	6	26	28	3

SDM NON PNS		
No	Penempatan	Jumlah
1.	Sekretariat	24 orang
2.	Bidang Perumahan	6 orang
3.	Bidang Kawasan Permukiman	28 orang
4.	Bidang Pertanahan, dan Tata Ruang	5 orang
Total Jumlah		63 orang

Tabel 2
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Menurut Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I/a			
I/b	1 Orang		1 Orang
I/c			
I/d	2 Orang		2 Orang
Jumlah	3 Orang		3 Orang
II/a	1 Orang		1 Orang
II/b	5 Orang		5 Orang
II/c	5 Orang		5 Orang
II/d	19 Orang	1 Orang	20 Orang
Jumlah	30 Orang	1 Orang	31 Orang
III/a	7 Orang	1 Orang	8 Orang
III/b	1 Orang	4 Orang	5 Orang
III/c	2 Orang		2 Orang
III/d	5 Orang	2 Orang	7 Orang
Jumlah	15 Orang	7 Orang	22 Orang
IV/a	3 Orang	2 Orang	5 Orang
IV/b	2 Orang		2 Orang
IV/c			
IV/d			
Jumlah	5 Orang	2 Orang	7 Orang
Total	53 Orang	10 Orang	63 Orang

Tabel 3
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Doktor (S3)			
Magister (S2)	4 Orang	2 Orang	6 Orang
Sarjana (S1)	14 Orang	5 Orang	19 Orang
Diploma IV (D IV)			
Diploma III (D III)		1 Orang	1 Orang
Diploma II (D II)			
Diploma I (D I)			

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA	27 Orang	2 Orang	25 Orang
SLTP	6 Orang		6 Orang
SD	2 Orang		2 Orang
Jumlah	53 Orang	10 Orang	63 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Nilai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
I	Alat Besar		
1	Truk Crane	unit	1
2	Pompa Air	unit	17
II	Komputer		
1	PC Unit	unit	39
2	Laptop	unit	15
3	Note Book	unit	10
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	unit	5
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	28
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	2
7	Peralatan Personal Komputer Lainnya	unit	3
8	Server	unit	1
III	Alat Keselamatan Kerja		
1	Air Conditioning (AC)	unit	4
IV	Alat Peraga		
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	unit	141
V	Alat Angkutan		
1	Station Wagon	unit	7
2	Kendaraan Dinas Perorangan Lainnya	unit	1
3	Mini Bus	unit	1
4	Yeengler/Trailer	unit	1
5	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	unit	1
6	Sepeda Motor	unit	23
7	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	unit	5
8	Pick Up	unit	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
9	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	unit	1
10	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	unit	2
11	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	unit	4
VI	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1	Mesin Kompresor	unit	1
2	Global Positioning System (GPS)	unit	20
3	Alat Ukur Universal Lainnya	unit	4
4	Rol Meter	unit	1
5	Sound Detector	unit	1
6	Mesin Gergaji	unit	3
7	Gergaji Chain Saw	unit	3
VII	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Lemari Besi/Metal	unit	8
2	Rak Besi	unit	1
3	Filling Cabinet Besi	unit	5
4	CCTV – Camera Control Television System	unit	1
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	unit	1
6	Alat Sidik Jari	unit	2
7	Papan Pengumuman	unit	10
8	Meja Kerja Besi/Metal	unit	2
9	Meja Kerja Kayu	unit	7
10	Kursi Besi/Metal	unit	610
11	Meja Rapat	unit	6
12	Meja Resepsionis	unit	55
13	Meja ½ Biro	unit	6
14	Kursi Rapat	unit	40
15	Kursi Lipat	unit	10
16	Mesin Pemotong Rumput	unit	39
17	AC Window	unit	1
18	AC Split	unit	25
19	Kipas Angin	unit	28
20	Alat Pendingin Lainnya	unit	2
21	Alat Dapur Lainnya	unit	1
22	Sound System	unit	3
23	Kaca Hias	unit	1
24	Lampu	unit	41
25	Alat Pemadam/Portable	unit	4
26	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	1
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	4
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	unit	11
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	unit	1
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit	4
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	unit	11

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
32	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	unit	1
33	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	unit	4
33	Alat Pemotong Kertas	unit	2
35	Kursi Biasa	unit	1
36	Camera Video	unit	1
37	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	unit	15
38	Alat Kantor Lainnya	unit	6
39	Tangga Alumunium	unit	2
40	Mimbar/Podium	unit	1
41	Alat Rumah Tangga Lainnya	unit	7
42	Alat Pembantu Kebakaran	unit	22
43	Lemari Kayu	unit	1
VIII	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
1	Layar Film/Protector	unit	4
2	Mesin Jilid	unit	2
3	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/ Peralatan Ukur Tanah)	unit	1
4	Intercom Unit	unit	1
5	Digital Audio Storage System	unit	1
6	Camera Film	unit	4
7	Lensa Camera	unit	3
8	Televisi	unit	1
IX	Alat Laboratorium		
1	Video Printer	unit	7
2	Pita Ukuran (Meteran)	unit	1
3	Generator	unit	4
4	Infra Red Thermometer	unit	1
X	Alat Pertanian		
1	Penyemprot Otomatis	unit	3

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2016)	Target Kinerja Sasaran Tahun					Realisasi Kinerja Sasaran Tahun					Rasio Capaian Kinerja Sasaran Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas kawasan kumuh	%	N/A	100,00 (3,6 ha)	6,47 (2,3 ha)	35,00	14,70	3,80	45,83 (1,6 ha)	45,83 (1,6 ha)	00,00	00,00	00,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	N/A	50.449	49.449	48.449	47.449	46.449	50.060	45.253	42.876	41.727	41.230	100,00	100,00	111,50	112,06	111,61
3	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia	dokumen	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	2	100	-	200	-	200
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	60,00	63,00	66,00	69,00	71,00	73,00	87,07	87,07	87,07	98,93	99,98	138,21	131,92	126,19	139,34	136,96
5	Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	-	-

Dari Tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2021, dari 6 (enam) indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang rata-rata capaian kinerja 100 % yaitu :

1. Persentase luas kawasan kumuh

Output dari indikator ini adalah luasan kumuh yang ada di Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen, setiap tahun berkurang/tertangani. Pada Tahun 2019, luasan kumuh yang ada di Kabupaten seluas 3,6 ha dinyatakan tidak kumuh lagi. Kegiatan yang mendukung pengurangan/penanganan luas kawasan kumuh adalah perbaikan jalan lingkungan permukiman.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator presentase luas kawasan kumuh adalah kurangnya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.

2. Jumlah rumah tidak layak huni

Output dari indikator ini adalah menurunnya jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Sragen, atau dengan kata lain rumah tidak layak huni ditingkatkan menjadi rumah layak huni untuk dihuni masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan dari kegiatan untuk mendukung penurunan jumlah rumah tidak layak huni diperoleh dari Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sragen.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator jumlah rumah tidak layak huni adalah anggaran yang belum mencukupi untuk kegiatan tersebut.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada serta pengajuan anggaran ke Pemerintah Pusat serta dukungan dari Pihak Ketiga.

3. Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia

Output dari indikator ini adalah jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun sampai dengan akhir tahun perencanaan. Sampai dengan Tahun 2021 telah disusun 5 (lima) dokumen perencanaan meliputi ;

- 1) Penyusunan Revisi RTRW pada Tahun 2017.
- 2) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sragen pada Tahun 2019.
- 3) Penyusunan dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang situ, danau, embung dan waduk (SDEW) prioritas 1 Waduk Kedung Ombo pada Tahun 2019.
- 4) RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong pada Tahun 2021.
- 5) RDTR OSS Kawasan Kota Industri Sambungmacan-Gondang pada Tahun 2021.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia adalah adanya anggaran kegiatan yang di refocusing terkait dengan penanganan Covid 19 pada Tahun 2020, sehingga tidak terlaksana pada Tahun 2020.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang ada adalah dengan menganggarkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

4. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Output dari kegiatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang adalah jumlah luasan pemanfaatan ruang eksisting di Kabupaten Sragen yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Sragen) Tahun 2011-2031. Perhitungan luasan tersebut dilakukan dengan metode tumpang tindih (overlay) antara peta eksisting tata guna lahan dan peta pola ruang RTRW Kabupaten Sragen, serta peta Revisi RTRW Sragen untuk kemudian dilakukan analisis terkait peruntukan ruang yang sesuai dan tidak sesuai pemanfaatannya.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang adalah tidak tersedianya update data dukung yang akurat serta tidak tersedianya update citra satelit yang terortorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) setiap tahun.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang ada adalah dengan melakukan analisis overlay menggunakan peta citra satelit yang terortorektifikasi oleh BIG pada tahun terakhir yang dimiliki.

5. Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti

Output dari kegiatan Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti adalah jumlah izin ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang

yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang setiap tahun.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti adalah adanya anggaran kegiatan yang di refocusing terkait dengan penanganan Covid-19 pada Tahun 2020 sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021, kegiatan monitoring dan evaluasi dianggarkan dalam rancangan Renja namun anggaran kegiatan tersebut terpotong dalam tahap realisasi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah dengan menganggarkan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 6
Target dan Realisasi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang tersedia	buah	NA	00	550	700	700	700	00	550	00	00	00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan untuk pembayaran rekening listrik, air dan telepon	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan untuk pembayaran perijinan kendaraan dinas/operasional	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan untuk pembayaran jasa administrasi keuangan	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang tercukupi jasa kebersihan kantor	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	NA	74	84	12	12	12	74	84	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang tercukupi alat tulis kantor	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tercukupi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	unit	NA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	unit	NA	2	00	00	00	00	2	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa perkantoran	bulan	NA	12	00	00	00	00	12	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
15	Penyediaan jaringan listrik (tambah daya)	Jumlah jaringan listrik (tambah daya) yang tersedia	paket	NA	2	00	1	00	00	2	00	1	00	00	100,00	00,00	100,00	00,00	00,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan angkutan darat	unit	NA	10	1	00	1	1	10	1	00	1	1	100,00	100,00	00,00	100,00	100,00
2	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	unit	NA	48	10	100	10	15	48	10	100	15	48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah bulan kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	bulan	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung/ kantor	unit	NA	13	00	3	00	41	13	00	3	00	41	100,00	00,00	100,00	00,00	100,00
6	Pemeliharaan rutin gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang dipelihara	unit	NA	2	00	00	00	00	2	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
III	Program penataan penguasaan, pemilikan,																		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	penggunaan dan pemanfaatan tanah																		
1	Pengadaan Tanah untuk Sarpras Pemerintah	Jumlah tanah yang tersedia untuk Sarpras Pemerintah	bidang	NA	00	00	00	2	2	00	00	00	2	2	00,00	00,00	00,00	100,00	100,00
2	Verifikasi tanah sebagai fasum/ fasos	Jumlah titik tanah yang terverifikasi	titik	NA	00	78	81	70	80	00	78	81	70	80	00,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyuluhan/sosialisasi sengketa tanah garapan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	NA	150	00	00	00	00	150	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyuluhan/sosialisasi tanah Negara/OO	Jumlah lokasi sosialisasi tanah Negara/OO	lokasi	NA	7	00	00	00	00	7	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
5	Pengadaan tanah makam	Jumlah tanah yang tersedia untuk areal pemakaman	bidang	NA	21	00	8	00	00	21	00	8	00	00	100,00	00,00	100,00	00,00	00,00
6	Pendataan tanah Negara	Jumlah lokasi pendataan tanah negara	lokasi	NA	14	00	00	00	00	14	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
7	Penyusunan site plan dan DED	Jumlah site plan dan DED yang tersusun	doku- men.	NA	00	00	1	00	00	00	00	1	00	00	00,00	00,00	100,00	00,00	00,00
8	Survey tanah	Jumlah bulan kegiatan survey pertanahan	bulan	NA	00	00	00	200	230	00	00	00	200	230	00,00	00,00	00,00	100,00	100,00
IV	Program Pengembangan Perumahan																		
1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah rumah yang ditangani	unit	NA	15	00	00	00	00	15	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	BOP RTLH	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH	bulan	NA	12	12	12	12	00	12	12	12	12	00	100,00	100,00	100,00	100,00	00,00
3	Perbaikan jalan lingkungan permukiman	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang diperbaiki	lokasi	NA	5	4	2	13	00	5	4	2	13	00	100,00	100,00	100,00	100,00	00,00
4	Pendataan RTLH	Data RTLH tersedia	keg.	NA	00	1	00	00	1	00	1	00	00	1	00,00	100,00	00,00	00,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5	Perumahan Swadaya (DAK)	Pendampingan kegiatan RTLH di Kawasan KOTAKU		NA	00	00	00	79	56	00	00	00	79	56	00,00	00,00	00,00	100,00	100,00
6	BOP DAK Perumahan Swadaya	Jumlah bulan pendampingan kegiatan RTLH di Kawasan KOTAKU	bulan	NA	00	00	12	12	10	00	00	12	12	10	00,00	00,00	100,00	100,00	100,00
7	Pembuatan Aplikasi RTLH	Jumlah aplikasi RTLH yang tersedia	aplikasi	NA	1	00	00	00	00	1	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	100,00
V	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan																		
1	Penyusunan system informasi pertanahan yang handal	Jumlah dokumen inventarisasi dan identifikasi asset pertanahan	doku- men.	NA	00	00	1	00	00	00	00	1	00	00	00,00	00,00	100,00	00,00	100,00
VI	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																		
1	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	meter	1.031	1.200	640	2.000	2.000	195	1.200	640	2.000	2.000	195	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong	Jumlah bulan saluran drainase/ gorong-gorong terpelihara	bulan	NA	12	12	12	00	12	12	12	12	00	12	100,00	100,00	100,00	00,00	100,00
3	Perencanaan pembanguinan saluran drainase gorong-gorong	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	doku- men.	NA	1	00	00	00	00	1	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
VII	Program Pengelolaan RTH																		
1	Penataan RTH	Jumlah RTH tertata	lokasi	NA	00	00	2	4	1	00	00	2	4	1	00,00	00,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	lokasi	NA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pemeliharaan Alun-alun Sragen	Jumlah bulan Alun-alun Sragen dipelihara	bulan	NA	12	00	00	00	00	12	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penataan Lingkungan	Jumlah lingkungan yang ditata	lokasi	NA	00	1	00	2	00	00	1	00	2	00	00,00	100,00	00,00	100,00	00,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
VIII	Program Pengembangan Areal Pemakaman																		
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah lokasi makam dibangun	lokasi	NA	3	00	00	00	00	3	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah lokasi makam dipelihara	lokasi	NA	00	00	1	00	00	00	00	1	00	00	00,00	00,00	100,00	00,00	00,00
IX	Program Perencanaan Tata Ruang																		
1	Survey dan Pemetaan	Jumlah Lokasi yang akan di Survey dan pemetaan	bulan	NA	350	350	350	350	00	350	350	350	216	00	100,00	100,00	100,00	61,71	00,00
2	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	kegiatan	NA	4	00	00	4	00	4	00	00	4	00	100,00	00,00	00,00	100,00	00,00
3	Penyusunan Revisi RTRW	Jumlah Laporan Akhir RTRW	doku- men	NA	1	00	00	00	00	1	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW	Jumlah Rancangan Perda tentang Revisi RTRW	doku- men	NA	00	1	00	00	00	00	1	00	00	00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00
5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen RDTR yang dihasilkan	doku- men	NA	00	00	3	1	00	00	00	3	1	00	00,00	00,00	100,00	100,00	00,00
X	Program Pemanfaatan Ruang																		
1	Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Rekomendasi Ijin Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	lokasi	NA	25	00	00	00	00	25	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi revisi perda RTRW	orang	NA	200	00	00	200	00	200	00	00	00	99	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi	lokasi	NA	150	00	00	00	00	150	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah pemohon Ijin perubahan status penggunaan lahan	lokasi	NA	00	00	150	00	00	00	00	150	00	00	00,00	00,00	100,00	00,00	00,00
XII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																		
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang	lokasi	NA	70	325	200	171	00	70	325	200	171	00	100,00	100,00	100,00	100,00	00,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi	lokasi	NA	30	50	50	200	00	30	50	50	21	00	100,00	100,00	100,00	10,5	00,00
3	Penyusunan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	doku men	NA	00	200	00	00	00	00	200	00	00	00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah pemohon Ijin perubahan status penggunaan lahan	lokasi	NA	00	00	00	150	00	00	00	00	96	00	00,00	00,00	00,00	64,00	00,00
XIII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/ Kota	Jumlah draft dokumen RTDR	doku men	NA	00	00	00	00	1	00	00	00	00	1	00,00	00,00	00,00	00,00	100,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Ijin Pengendalian Pemanfaatan Ruang (IPPT)	buah	NA	00	00	00	00	120	00	00	00	00	239	00,00	00,00	00,00	00,00	199,17
3	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pemberian Advise Planning serta Informasi Tata Ruang kepada masyarakat	buah	NA	00	00	00	00	120	00	00	00	00	325	00,00	00,00	00,00	00,00	270,83

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2016	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah	buah	NA	00	00	00	00	100	00	00	00	00	312	00,00	00,00	00,00	00,00	312,00

Tabel 7
Review Capaian Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Tahun 2017 s.d. 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.363.240.000	2.104.427.000	2.675.561.000	2.613.635.000	2.357.310.630	1.217.698.767	1.925.920.277	2.403.555.421	2.441.238.884	2.263.280.959	89,32	91,52	89,33	93,40	96,01	17,35	19,31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	00	3.150.000	00	00	00	00	3.150.000	00	00	00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	247.200.000	311.000.000	371.500.000	250.900.000	260.100.000	145.356.355	181.604.607	203.837.047	197.266.253	174.522.663	58,87	58,39	54,87	78,62	67,10	4,12	5,61
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	30.000.000	15.000.000	20.000.000	20.750.000	00	7.429.200	8.118.750	12.844.800	12.803.375	00	24,76	54,13	64,22	61,70	00,00	(4,31)	22,39
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	136.800.000	136.200.000	78.100.000	97.669.000	00	132.900.000	114.114.800	64.150.000	92.344.000	00	97,15	83,78	82,14	94,55	00,00	(6,01)	(4,66)
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor/Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.500.000	1.176.527.000	1.398.083.000	1.783.438.000	1.685.842.970	94.869.500	1.175.260.000	1.372.998.000	1.681.443.000	1.684.568.000	99,34	99,89	98,21	94,28	99,92	293,22	294,57
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.000.000	72.000.000	50.000.000	21.500.000	00	41.200.000	72.000.000	49.406.000	21.500.000	00	91,56	100,00	98,81	100,00	00,00	(9,19)	(4,37)
7	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	30.000.000	62.438.000	27.323.000	34.861.000	29.456.000	29.809.000	62.438.000	27.323.000	34.747.500	98,19	99,36	100,00	100,00	99,67	19,87	20,40
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.800.000	35.000.000	42.900.000	40.725.000	40.386.930	34.612.000	34.903.000	42.900.000	40.725.000	38.599.350	99,46	99,72	100,00	100,00	95,57	4,31	3,37
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	69.500.000	76.000.000	80.000.000	61.583.000	86.033.220	66.685.000	65.970.000	78.350.000	60.564.000	84.016.250	95,95	86,80	97,94	98,35	97,66	7,82	8,43
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	250.340.000	25.000.000	296.282.000	178.747.000	159.722.930	246.822.000	24.583.800	249.174.800	176.370.000	156.860.960	98,59	98,34	84,01	98,67	98,21	236,20	195,81

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.250.000	00	00	00	00	7.181.000	00	00	00	00	99,05	00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	106.050.000	124.550.000	157.108.000	100.000.000	71.639.600	102.550.000	117.271.000	148.953.600	99.907.500	71.606.600	96,70	94,15	94,81	99,91	99,95	(5,28)	(4,49)
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55.000.000	100.000.000	76.250.000	31.000.000	18.723.980	53.833.712	99.135.320	76.153.174	30.992.756	18.359.636	97,88	99,14	99,87	99,98	98,05	(10,22)	(9,77)
14	Penyediaan jasa perkantoran	202.800.000	00	00	00	00	202.800.000	00	00	00	00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00
15	Penyediaan jaringan listrik (tambah daya)	53.000.000	00	42.900.000	00	00	52.004.000	00	42.350.000	00	00	98,12	00,00	98,72	00,00	00,00	0,00	00,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.894.383.000	1.955.693.000	2.141.465.000	1.046.308.000	1.226.906.500	1.176.560.950	1.896.132.250	1.929.515.652	979.086.604	1.091.606.132	93,09	96,95	90,10	93,58	88,97	(5,29)	(7,12)
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	817.888.000	1.300.000.000	00	30.830.000	00	797.279.000	1.299.999.900	00	27.830.000	00	97,48	99,99	00,00	90,27	00,00	00,00	00,00
2	Pengadaan mebeleur	108.866.000	33.000.000	41.000.000	15.970.000	00	100.275.000	32.557.400	40.370.000	15.407.500	00	92,11	98,66	98,46	96,48	00,00	(51,62)	(51,34)
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	130.000.000	275.000.000	1.385.000.000	502.870.000	424.917.900	128.616.000	272.602.800	1.349.558.000	490.707.000	419.206.000	98,94	99,13	97,44	97,58	98,66	109,00	107,20
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	368.720.000	347.693.000	465.465.000	496.638.000	801.988.600	276.099.950	290.972.150	294.107.652	445.142.604	672.400.132	74,88	83,69	63,19	89,63	83,84	24,09	27,22
5	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	108.700.000	00	250.000.000	00	00	105.050.000	00	245.480.000	00	00	96,64	00,00	98,19	00,00	00,00	00,00	00,00
6	Pemeliharaan rutin gedung pertemuan	360.209.000	00	00	00	00	356.241.000	00	00	00	00	98,90	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
III	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5.180.000.000	100.000.000	2.275.000.000	9.352.947.000	9.453.864.550	3.876.961.640	82.440.800	2.150.028.400	9.213.324.850	8.599.872.243	74,84	82,44	94,51	98,51	90,97	597,28	912,87

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
1	Pengadaan Tanah untuk Sarpras Pemerintah	00	00	00	9.252.797.000	9.300.000.000	00	00	00	9.114.691.400	8.447.172.243	00,00	00,00	00,00	98,51	90,83	00,00	00,00
2	Verifikasi tanah sebagai fasum/fasos	00	100.000.000	150.000.000	50.150.000	85.950.000	00	82.440.800	127.551.600	48.837.050	84.800.000	00,00	82,44	85,03	97,38	98,66	18,27	22,22
3	Penyuluhan/sosialisasi sengketa tanah garapan	60.000.000	00	00	00	00	41.850.000	00	00	00	00	69,75	00,00	00,00	00,00	00	00,00	00,00
4	Penyuluhan/sosialisasi tanah Negara/OO	70.000.000	00	00	00		59.849.200	00	00	00	00	85.50	00,00	00,00	00,00	00	00,00	00,00
5	Pengadaan tanah makam	5.000.000.000	00	2.000.000.000	00	00	3.763.824.440	00	1.899.666.000	00	00	75,28	00,00	94,98	00,00	00	00,00	00,00
6	Pendataan tanah Negara	50.000.000	00	00	00		13.438.000	00	00	00	00	26,88	00,00	00,00	00,00	00	00,00	00,00
7	Penyusunan site plan dan DED	00	00	125.000.000	00	00	00	00	122.810.800	00	00	00,00	00,00	98,25	00,00	00	00,00	00,00
8	Survey tanah	00	00	00	50.000.000	67.914.550	00	00	00	49.796.400	67.900.000	00,00	00,00	00,00	99,59	99,98	00,00	00,00
IV	Program Pengembangan Perumahan	1.710.000.000	2.246.000.000	1.048.750.000	2.933.406.000	1.381.621.590	1.558.273.409	2.136.224.921	1.010.337.378	2.898.306.562	1.341.624.540	67,74	95,11	96,34	98,80	97,11	24,50	26,82
1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	254.000.000	00	00	00	00	243.255.000	00	00	00	00	95,77	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	BOP RTLH	406.000.000	275.000.000	450.000.000	180.000.000	00	269.113.609	243.940.921	427.058.878	178.869.262	00	66,28	88,71	94,90	99,37	00	(9,54)	2,53
3	Perbaikan jalan lingkungan permukiman	1.000.000.000	1.700.000.000	450.000.000	1.357.900.000	00	996.134.800	1.649.552.000	434.528.500	1.323.931.300	00	99,61	97,03	96,56	97,50	00	66,08	65,54
4	Pendataan RTLH	00	271.000.000	00	00	40.000.000	00	242.732.000	00	00	36.312.400	00,00	89,57	00,00	00,00	90,78	00,00	00,00
5	Perumahan Swadaya (DAK)/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	00	00	00	1.382.500.000	1.124.456.000	00	00	00	1.382.500.000	1.124.456.000	00,00	00,00	00,00	100,00	100,00	00,00	00,00
6	BOP DAK Perumahan Swadaya	00	00	148.750.000	13.006.000	217.165.590	00	00	148.750.000	13.006.000	180.856.140	00,00	00,00	100,00	100,00	83,28	739,24	599,65
7	Pembuatan Aplikasi RTLH	50.000.000	00	00	00	00	49.770.000	00	00	00	00	99,54	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
V	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	00	00	200.000.000	00	00	00	00	189.736.800	00	00	00,00	00,00	94,87	00,00	00,00	00,00	00,00
1	Penyusunan system informasi pertanahan yang handal	00	00	200.000.000	00	00	00	00	189.736.800	00	00	00,00	00,00	94,87	00,00	00,00	00,00	00,00
VI	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.294.590.000	1.465.000.000	1.750.000.000	259.125.000	349.999.491	3.236.138.200	1.423.137.900	1.674.610.919	253.984.600	335.856.475	98,23	97,14	95,69	98,02	95,96	(21,55)	(22,74)
1	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	2.750.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	259.125.000	49.999.671	2.706.727.400	966.217.000	1.157.027.700	253.984.600	39.274.825	98,43	96,62	96,42	98,01	78,55	(50,69)	(51,78)
2	Pemeliharaan gorong/gorong	494.590.000	465.000.000	550.000.000	00	299.999.820	482.520.800	456.920.900	517.583.219	00	296.581.650	97,56	98,26	94,11	00,00	98,86	(29,23)	(30,68)
3	Perencanaan pembanguinan saluran drainase gorong-gorong	50.000.000	00	00	00	00	46.890.000	00	00	00	00	93,78	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
VII	Program Pengelolaan RTH	1.558.064.000	2.314.450.000	3.075.390.000	3.328.325.000	2.049.950.929	1.462.967.950	2.241.071.450	2.881.389.701	3.217.330.779	1.947.898.000	93,90	96,83	93,69	96,67	95,02	12,81	13,49
1	Penataan RTH	00	00	1.974.300.000	375.000.000	00	00	00	1.911.223.985	370.010.150	00	00,00	00,00	96,81	98,67	00,00	00,00	00,00
2	Pemeliharaan RTH	508.064.000	764.450.000	1.101.090.000	653.325.000	2.049.950.929	424.178.950	723.818.050	970.165.716	615.640.629	1.947.898.000	83,49	94,68	88,11	94,23	95,02	66,90	71,13
3	Pemeliharaan Alun-alun Sragen	1.050.000.000	00	00	00	00	1.038.789.000	00	00	00	00	98,93	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penataan Lingkungan	00	1.550.000.000	00	2.300.000.000	00	00	1.517.253.400	00	2.231.680.400	00	00,00	97,89	00,00	97,03	00,00	00,00	00,00
VIII	Program Pengembangan Areal Pemakaman	246.500.000	00	200.000.000	00	00	223.795.000	00	196.906.000	00	00	90,79	00,00	98,45	00,00	00,00	00,00	00,00
1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	246.500.000	00	00	00	00	223.795.000	00	00	00	00	90,79	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	00	00	200.000.000	00	00	00	00	196.906.000	00	00	00,00	00,00	98,45	00,00	00,00	00,00	00,00
IX	Program Perencanaan Tata Ruang	685.000.000	400.000.000	620.000.000	397.456.509	00	621.043.174	393.856.754	598.821.797	383.537.216	00	90,66	98,46	96,58	96,50	00,00	(7,50)	(6,83)
1	Survey dan Pemetaan	150.000.000	150.000.000	170.000.000	84.775.000	00	148.231.000	148.249.447	168.885.469	79.074.700	00	98,82	98,83	99,34	93,28	00,00	(12,27)	(13,08)
2	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	135.000.000	00	00	250.000.000	00	92.677.500	00	00	242.344.507	00	68,65	00,00	00,00	96,94	00,00	00,00	00,00
3	Penyusunan Revisi RTRW	400.000.000	00	00	00	00	380.134.674	00	00	00	00	95,03	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Rancangan Perda tentang RTRW	00	250.000.000	00	00	00	00	245.607.307	00	00	00	00,00	98,24	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	00	00	450.000.000	62.681.509	00	00	00	429.936.328	62.118.009	00	00,00	00,00	95,54	99,10	00,00	00,00	00,00
X	Program Pemanfaatan Ruang	332.000.000	00	100.000.000	20.238.000	00	325.724.850	00	98.785.302	20.238.000	00	98,11	00,00	98,79	100,00	00,00	00,00	00,00
1	Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang	25.000.000	00	00	00	00	24.970.000	00	00	00	00	99,88	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	50.000.000	00	00	20.238.000	00	49.914.000	00	00	20.238.000	00	99,83	00,00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	257.000.000	00	00	00	00	250.840.850	00	00	00	00	97,60	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	00	00	100.000.000	00	00	00	00	98.785.302	00	00	00,00	00,00	98,79	00,00	00,00	00,00	00,00
XII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000	575.000.000	250.000.000	304.713.700	00	59.815.000	550.952.124	241.527.091	300.025.900	00	59,82	97,38	96,61	98,46	00,00	146,79	263,05

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg.	Real.
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	70.000.000	325.000.000	200.000.000	171.611.700	00	30.355.000	316.770.300	191.927.091	166.924.200	00	43,36	97,47	95,96	97,27	00,00	103,88	297,04
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	50.000.000	50.000.000	15.375.200	00	29.460.000	48.159.800	49.600.000	15.375.000	00	98,20	96,32	99,20	100,00	00,00	(32,61)	(0,85)
3	Penyusunan Pemanfaatan Ruang	00	200.000.000	00	00	00	00	195.022.024	00	00	00	00,00	97,51	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	00	00	00	117.726.800	00	00	00	00	117.726.700	00	00,00	00,00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00
XIII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	00	00	00	00	697.432.590	00	00	00	00	675.096.004	00,00	00,00	00,00	00,00	96,80	00,00	00,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/ Kota	00	00	00	00	349.997.890	00	00	00	00	335.001.045	00,00	00,00	00,00	00,00	95,72	00,00	00,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	00	00	00	00	147.783.700	00	00	00	00	144.106.150	00,00	00,00	00,00	00,00	97,51	00,00	00,00
3	Sistem Informasi Penataan Ruang	00	00	00	00	82.700.000	00	00	00	00	81.473.209	00,00	00,00	00,00	00,00	98,52	00,00	00,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	00	00	00	00	116.951.000	00	00	00	00	114.515.600	00,00	00,00	00,00	00,00	97,92	00,00	00,00

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, disebabkan adanya perubahan komponen anggaran dan refocusing anggaran terkait pandemi *covid-19*. Penggunaan anggaran yang ada tetap digunakan untuk mendanai program/kegiatan prioritas, yaitu :

- 1) Perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sragen.
- 3) Pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau publik yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang.

Capaian pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Tahun 2017 s.d. 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	2017			
1	Retribusi Jasa Umum	30.250.000	54.508.000	180,19
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	4.000.000	15.308.000	382,70
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	26.250.000	39.200.000	149,33
2	Retribusi Jasa Usaha	168.000.000	190.957.000	113,66
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	145.000.000	175.107.000	120,76
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000	13.850.000	138,50
-	Retribusi Tempat Rekreasi	13.000.000	2.000.000	15,38
3	Hasil dari Pemanfaatan Kakayaan Daerah	80.000.000	145.000.000	181,25
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	80.000.000	145.000.000	181,25
	Jumlah	278.250.000	390.465.000	140,33

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
II	2018			
1	Retribusi Jasa Umum	106.000.000	77.285.000	72,91
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	56.000.000	37.710.000	67,34
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	50.000.000	39.575.000	79,15
2	Retribusi Jasa Usaha	244.500.000	61.610.000	25,20
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	215.000.000	54.285.000	25,25
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	12.500.000	3.625.000	29,00
-	Retribusi Tempat Rekreasi	17.000.000	3.700.000	21,76
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	726.788.000	652.493.950	89,78
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	726.788.000	652.493.950	89,78
	Jumlah	1.077.288.000	791.388.950	73,46
III	2019			
1	Retribusi Jasa Umum	106.194.000	202.448.000	190,64
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	45.656.000	58.498.000	128,13
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	60.538.000	143.950.000	237,78
2	Retribusi Jasa Usaha	450.000.000	409.503.000	91,00
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	415.000.000	374.453.000	90,23
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000	22.050.000	110,25
-	Retribusi Tempat Rekreasi	15.000.000	13.000.000	86,67
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.215.537.500	1.347.158.412	60,81
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	2.215.537.500	1.347.158.412	60,81
	Jumlah	2.771.731.500	1.959.109.412	70,68
IV	2020			
1	Retribusi Jasa Umum	125.656.000	396.250.000	315,35
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	55.656.000	40.500.000	72,77
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	70.000.000	355.750.000	508,21

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2	Retribusi Jasa Usaha	284.250.000	209.716.000	73,78
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	258.750.000	182.316.000	70,46
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.500.000	27.200.000	111,02
-	Retribusi Tempat Rekreasi	1.000.000	200.000	20,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kakayaan Daerah	1.085.642.000	1.309.109.692	120,58
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	1.085.642.000	1.309.106.692	120,58
	Jumlah	1.495.548.000	1.915.075.692	128,05
V	2021			
1	Retribusi Jasa Umum	250.000.000	287.300.000	114,92
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	50.000.000	54.050.000	108,10
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	200.000.000	233.250.000	116,63
2	Retribusi Jasa Usaha	119.520.000	129.010.000	107,94
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	103.770.000	110.860.000	106,83
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.750.000	18.150.000	115,24
-	Retribusi Tempat Rekreasi	00	00	00,00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kakayaan Daerah	1.612.839.342	1.584.745.593	98,26
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	1.612.839.342	1.584.745.593	98,26
	Jumlah	1.982.359.342	2.001.055.593	100,94

Dari Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian pendapatan selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, tidak semuanya melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah :

- 1) Adanya renovasi gedung pertemuan yang disewakan (Gedung Kartini) merupakan salah satu alasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk Tahun 2019 dan 2020 adanya pandemi covid-19 juga mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas.

2.4.1. Tantangan

Tantangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen antara lain :

1. Kantong perumahan yang padat dan adanya lingkungan kumuh di wilayah perkotaan.
2. Alih fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan menjadi daerah hunian/perumahan.
3. Banyaknya rumah tidak layak huni yang perlu mendapatkan bantuan untuk diperbaiki.
4. Masih adanya permasalahan agraria.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dalam menangani urusannya adalah :

1. Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan tempat khusus parkir dan sewa gedung pertemuan.
3. Memaksimalkan pemanfaatan asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.
4. Potensi tata ruang diharapkan mengakomodasi kondisi wilayah Kabupaten Sragen.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan periode 2021-2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya yaitu periode 2016 – 2021. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen :

1. Masih banyaknya kekurangan kebutuhan rumah/backlog dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat.
2. Masih adanya Kawasan Permukiman Kumuh di perkotaan Kabupaten Sragen (penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Sragen dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 648/437/003/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman di Kabupaten Sragen).
3. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
5. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi.
6. Kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam rangka investasi.
7. Belum optimalnya pemanfaatan tanah milik Pemda.
8. Belum optimalnya penanganan konflik tanah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021 – 2026 yang dijadikan Visi Kabupaten Sragen Jangka Menengah 2021-2026 adalah “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat

Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kabupaten Sragen Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan.
4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Ada 2 (dua) misi yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen untuk mendukung visi Kabupaten Sragen yaitu misi ke 4 (empat) adalah “Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja” dan misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong”.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu - isu strategis antara lain :

1. Masih banyaknya kekurangan kebutuhan rumah/backlog
2. Masih rendahnya penataan permukiman di perkotaan.
3. Belum tertatanya kawasan permukiman di perkotaan.
4. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
5. Masih adanya kawasan kumuh di perkotaan.
6. Masih adanya konflik agraria yang perlu untuk dimediasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020). Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk melaksanakan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 tersebut, Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen adalah Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Apabila ditelaah secara seksama maka misi Kementerian Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan dan

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen, terutama dalam mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan tata ruang.

Terkait dengan urusan pertanahan dan sub urusan penataan ruang maka dokumen Rentra K/L yang diacu adalah Renstra dari Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, maka visi yang akan dicapai oleh Kementerian tersebut adalah : “Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian ATR/BPN adalah :

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka indikator capaian yang ingin diraih dalam Renstra Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian ATR/BPN
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Ukuran	2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 1 : Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	Indeks	0.0002	0,0008	0,0025	0,0047	0,0061
IKSS 1 : Peningkatan Pendapatan per Kapita Penerima Reforma Agraria	Persentase	5	10	15	20	25
IKSS 3 : Nilai Kepastian dan	Nilai	4	4	5	5	5

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Ukuran	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Hak atas Tanah						
IKSS 4 : Peningkatan Kemudahan Investasi (<i>Registering Property</i> dalam EoDB)	Peringkat, Skor (0-100)	Peringkat 106 (Skor 60)	Peringkat 80 (Skor 68)	Peringkat 65 (Skor 72)	Peringkat 50 (Skor 76)	Peringkat 40 (Skor 78)
IKSS 5 : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,12	0,36	0,58	0,80	1,00
IKSS 6 : Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	78	82	86	90

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilyah tersebut.

Dalam RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, berikut ini merupakan program yang terkait dengan tugas dan fungsi Disperkimtaru, yaitu :

1. Tingkat pelayanan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) di Kabupaten Sragen.
2. Penyusunan 6 (enam) rencana rinci tata ruang (RTR).

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak lepas dari ketersediaan lahan. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi daerah hunian/perumahan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis terkait tugas dan fungsi Disperkimtaru, yaitu:

1. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
2. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, saluran/gorong-gorong, dan air buangan.
3. Perlunya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin, pekerja/buruh dan masyarakat dengan keterbatasan pembiayaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa rencana kerja yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam misi ke 4 (empat) yaitu “Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja” dan misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong”.

Sesuai dengan misi tersebut maka ditetapkan tujuan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yaitu :

1. Meningkatkan Standar Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertahanan.

3. Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Berlaku.

4.2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen. Adapun tujuan yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen adalah meningkatkan standar kualitas sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman, terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi bidang pertahanan serta meningkatkan pengelolaan ruang sesuai dengan Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, yang akan diwujudkan dengan sasaran terpenuhinya pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terpenuhinya pelayanan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 10
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan
dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan NSPK yang Berlaku		Indeks Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	85,00	87,00	88,00	90,00	92,00
		Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,85	0,96	1,00	1,00	1,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Capaian Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan Peruntukan						
2	Meningkatkan Standar Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman		Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	43,65	58,82	78,98	94,15	94,31
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani	Persentase Rumah Layak Huni	87,31	87,64	87,97	88,30	88,62
			Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	0,00	30,00	70,00	100,00	100,00
3	Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertanahan		Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	21,00	23,00	20,00	19,00	17,00
		Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dengan formulasi sebagai berikut :

1) Indeks Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Formulasinya adalah
$$= \frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang}}{\text{Jumlah Sampel Monitoring Evaluasi}}$$

2) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Formulasinya adalah
$$= \frac{\text{Indeks Perencanaan + Indeks Kepatuhan Tata Ruang} \quad \text{Pemanfaatan Ruang}}{2}$$

3) Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

$$\text{Formulasinya adalah} = \frac{\text{Persentase Rumah Layak Huni} + \text{Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani}}{2}$$

4) Pesentase Rumah Layak Huni

$$\text{Formulasinya adalah} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100 \%$$

5) Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani

$$\text{Formulasinya adalah} = \frac{\text{Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani}}{\text{Jumlah Luas Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan}} \times 100 \%$$

6) Indeks Penyelenggaraan Pertanahan

$$\text{Formulasinya adalah} = \frac{\text{Indeks Penyelesaian Sengketa} + \text{Indeks Penyelesaian Ganti Rugi} + \text{Indeks Redistribusi Tanah} + \text{Indeks Penatagunaan Tanah}}{4}$$

7) Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten

$$\text{Formulasinya adalah} = \frac{\text{Persentase Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Tertangani} + \text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan} + \text{Persentase Penyelesaian Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata} + \text{Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria}}{4}$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen guna ***“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Gotong Royong”***.

Strategi yang akan diambil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dalam menjawab permasalahan-permasalahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang adalah:

1. Meningkatkan kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, pelaksanaan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang dan monitoring evaluasi pengendalian pemanfaatan tata ruang.
2. Penanganan permasalahan pertanahan.
3. Mencari sumber dana lain untuk penanganan korban bencana
4. Pengurangan Kawasan Kumuh.
5. Mengoptimalkan Anggaran APBD Kabupaten dan Sumber Dana Lainnya untuk Penanganan RTLH dan PSU di Kawasan Kumuh dan Pencegahan Kumuh.

Sedangkan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen adalah :

1. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan arahan pengembangan RTRW meliputi kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Memberikan kepastian hukum bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3. Melaksanakan penanganan rumah tidak layak huni dari korban bencana dari sumber dana APBD dan CSR.
4. Menangani RTLH dan PSU di Kawasan Kumuh dan Pencegahan Kumuh.

5. Fasilitasi Penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan.
6. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan di bawah 10 (sepuluh) Ha.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rincian 12 program dan 20 kegiatan dan 37 Sub kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTR Kabupaten/ Kota
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan-undangan Bidang Penataan Ruang
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang
2. Kawasan Permukiman

- a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh
 - Pembangunan Rumah Layak Huni
3. Pengembangan Perumahan
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
4. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Kecil
 - Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi Kecil
5. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
 - Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha
7. Pengembangan Permukiman

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - a. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
11. Penatagunaan Tanah
 - a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
12. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Mobil
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun (2021-2026) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen sesuai dengan strategi dan arah kebijakan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 11
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TUJUAN : Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan NSPK yang Berlaku	Indeks Kepatuhan terhadap RTRW	SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Indeks	14,29	35,71	64,29	980.000.000	85,71	975.000.000	92,86	375.000.000	92,86	00	100,00	300.000.000	100,00	2.630.000.000	
					Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	Indeks	100,00	100,00	97,50	403.500.000	98,00	750.000.000	98,25	730.000.000	98,50	730.000.000	98,75	430.000.000	98,80	3.043.500.000		
				1.03.12.2.01	KEGIATAN : Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Persetujuan Substansi	%	14,29	28,57	57,14	300.000.000	85,71	625.000.000	100,00	375.000.000	100,00	00	100,00	00	100,00	1.300.000.000	
				1.03.12.2.01.02	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Persetujuan Substansi.	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi	Dokumen	00	1,00	1,00	150.000.000	2,00	300.000.000	1,00	150.000.000	00	00	00	00	4,00	600.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTR Kabupaten/ Kota	dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota																
				1.03.12.2.01.03	SUB KEGIATAN : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	Doku- men	00	00	1,00	150.000.000	2,00	325.000.000	2,00	225.000.000	00	00	00	00	5,00	700.000.000	
				1.03.12.2.02	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/ Kota yang Tersusun	%	14,29	42,86	71,43	680.000.000	85,71	350.000.000	85,71	00	85,71	00	100,00	300.000.000	100,00	1.330.000.000	
				1.03.12.2.02.01	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Doku- men	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota																	
				1.03.12.2.02.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Doku- men	00	2,00	2,00	680.000.000	1,00	350.000.000	00	00	00	00	00	00	00	3,00	1.030.000.000	
				1.03.12.2.03	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00	95,00	183.500.000	96,00	450.000.000	96,50	430.000.000	97,00	430.000.000	97,50	330.000.000	97,50	1.823.500.000		
				1.03.12.2.03.01	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Doku men	00	00	1,00	183.500.000	1,00	450.000.000	1,00	430.000.000	1,00	430.000.000	1,00	330.000.000	5,00	1.183.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				1.03.12.2.04	KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00	100,00	220.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	100.000.000	100,00	1.220.000.000	
				1.03.12.2.04.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	00	00	1,00	220.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	100.000.000	5,00	1.220.000.000	
TUJUAN : Meningkatkan Standar Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SASARAN : Meningkatkan Jumlah Rumah Layak Huni dan Luas Kawasan	Persentase Rumah Layak Huni	1.04.03	PROGRAM : Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	N/A	N/A	100,00	2.480.000.000	100,00	2.170.000.000	100,00	1.970.000.000	100,00	2.070.000.000	100,00	2.870.000.000	100,00	11.560.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kumuh Perkotaan yang Tertangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani			Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani	%	100,00	100,00	00,00	00	30,00	400.000.000	70,00	600.000.000	100,00	700.000.000	100,00	00	100,00	1.700.000.000	
				1.04.03.2.03	KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (unit)	Unit	64,00	56,00	79,00	2.480.000.000	79,00	2.170.000.000	75,00	1.970.000.000	75,00	2.070.000.000	75,00	2.870.000.000	383,00	11.560.000.000	
				Jumlah Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan yang Tertangani (Ha)		Ha	3,60	3,60	00,00	00	0,80	400.000.000	1,20	600.000.000	2,44	700.000.000	2,44	00	2,44	1.700.000.000		
				1.04.03.2.03.02	SUB KEGIATAN : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	64,00	56,00	00,00	00	00,00	00	00,00	00	00,00	00	00,00	00	00,00	00	00,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				1.04.03.2.03.06	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	Ha	3,60	3,60	00,00	00	0,80	400.000.000	1,20	600.000.000	2,44	700.000.000	2,44	00	2,44	1.700.000.000			
				1.04.03.2.03.08	SUB KEGIATAN : Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	Unit	64,00	56,00	79,00	2.480.000.000	79,00	2.170.000.000	75,00	1.970.000.000	75,00	2.070.000.000	75,00	2.870.000.000	383,00	11.560.000.000			
				1.04.02	PROGRAM : Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Menerima Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	
						Persentase Rumah Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	1.750.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						yang ditangani																		
				1.04.02.2.01	KEGIATAN : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Teridentifikasi Beserta By Name By Adress bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Doku- men	N/A	N/A	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	
				1.04.02.2.01.05	SUB KEGIATAN : Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program	Doku- men	N/A	N/A	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi																
				1.04.02.2.03	KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Ditangani (unit)	Unit	N/A	N/A	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	110,00	1.750.000.000	
				1.04.02.2.03.01	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit	N/A	N/A	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	22,00	350.000.000	110,00	1.750.000.000	
				1.04.06	PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	%	N/A	00	00	00	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	120.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					dan Kawasan Permukiman																	
				1.04.06.2.01	KEGIATAN Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang yang Terverifikasi dan Teregistrasi	Badan Hukum	N/A	00	00	00	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	20,00	120.000.000	
				1.04.06.2.01.01	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	Laporan	N/A	00	00	00	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	20,00	120.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																
				1.04.05	PROGRAM : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	61,40	72,00	75,00	1.852.000.000	78,00	350.000.000	80,00	350.000.000	82,00	350.000.000	85,00	350.000.000	85,00	3.252.000.000	
				1.04.05.2.01	KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Jumlah Data Pengalihan Tanah untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)/ Fasum dan Fasos Perumahan (unit)	Unit	00	00	20,00	1.852.000.000	20,00	350.000.000	20,00	350.000.000	20,00	350.000.000	20,00	350.000.000	100,00	3.252.000.000	
				1.04.05.2.01.01	SUB KEGIATAN : Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan	Dokumen	00	00	20,00	50.000.000	20,00	50.000.000	20,00	50.000.000	20,00	50.000.000	20,00	50.000.000	100,00	250.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Utilitas Umum (PSU) Perumahan	PSU Perumahan																		
				1.04.05.2.01.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	6,00	6,00	6,00	1.700.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	30,00	2.500.000.000	
				1.04.05.2.01.03	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Laporan			20,00	102.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	100,00	502.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				1.04.04	PROGRAM : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100.000.000	100,00	600.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	3.700.000.000	
				1.04.04.2.01	KEGIATAN : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH di Kawasan Pencegahan Kumuh yang Tertangani atau Terfasilitasi	Unit	00	00	28,00	100.000.000	150,00	600.000.000	190,00	1.000.000.000	190,00	1.000.000.000	190,00	1.000.000.000	748,00	3.700.000.000	
				1.04.04.2.01..01	SUB KEGIATAN : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Unit Rumah	00	00	28,00	100.000.000	150,00	600.000.000	190,00	1.000.000.000	190,00	1.000.000.000	190,00	1.000.000.000	748,00	3.700.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Kumuh di Luar Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Diperbaiki																
				1.03.07	PROGRAM : Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Strategis Perkotaan Kondisi Baik	%	69,84	70,20	70,82	1.300.000.000	71,44	5.825.000.000	72,05	1.340.000.000	72,66	9.875.000.000	73,28	3.000.000.000	73,28	21.340.000.000	
				1.03.07.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	69,68	69,68	70,20	1.300.000.000	70,72	600.000.000	71,21	600.000.000	71,72	600.000.000	72,73	600.000.000	72,73	3.700.000.000	
						Persentase Ruang Terbuka Hijau dalam kondisi baik	%	70,00	70,72	71,44	00	72,16	5.225.000.000	72,88	740.000.000	73,60	9.275.000.000	74,32	2.400.000.000	74,32	17.640.000.000	
				1.03.07.2.01.01	SUB KEGIATAN : Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman	Sistem Jaringan	N/A	N/A	8,30	1.300.000.000	8,60	600.000.000	8,90	600.000.000	9,20	600.000.000	9,50	600.000.000	9,50	3.700.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota																
					Luasan Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara (Ha)	ha	13,90	13,90	0,10	00	0,10	5.225.000.000	0,10	740.000.000	0,10	9.275.000.000	0,10	2.400.000.000	0,50	17.640.000.000		
TUJUAN : Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	SASARAN : Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	2.10.04	PROGRAM : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Tertangani	%	30,00	65,00	100,00	55.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	255.00.000	
				2.10.04.2 01	KEGIATAN : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sengketa Tanah yang Termediasi (kasus)	Kasus			15,00	55.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	55,00	255.000.000	
				2.10.04.2 01.02	SUB KEGIATAN : Mediasi Penyelesaian	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi	Doku men			15,00	55.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	55,00	255.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
				2.10.05	PROGRAM : Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%			100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	
				2.10.05.2.01	KEGIATAN : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah (kegiatan)	Kegiatan			1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				2.10.05.2.01.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen			1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	
				2.10.06	PROGRAM : Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	00	00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	
				2.10.06.2.01	KEGIATAN : Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan	Dokumen			1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Reforma Agraria (dokumen)																
				2.10.06.2.01.03	SUB KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen			1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	5,00	250.000.000	
				2.10.10	PROGRAM : Penatagunaan Tanah	Persentase Jumlah Titik Aset Tanah yang Terdata	%	37,91	21,80	100,00	105.000.000	100,00	50.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	230.000.000	
				2.10.10.2.01	KEGIATAN : Penggunaan Tanah yang Hamparan	Persentase Jumlah Titik Aset Tanah	%	37,91	21,80	100,00	105.000.000	100,00	50.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	230.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					nya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	yang Terdata (%)																
				2.10.10.2.01.01	SUB KEGIATAN : Koordinas dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota				300,00	105.000.000	50,00	50.000.000	25,00	25.000.000	25,00	25.000.000	25,00	25.000.000	425,00	230.000.000	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	13.442.575.040	100,00	13.683.847.000	100,00	13.339.099.000	100,00	13.339.099.000	100,00	13.769.168.000	100,00	67.573.788.000	
					KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	8.311.247.183	100,00	8.311.247.143	100,00	8.034.118.000	100,00	8.311.247.143	100,00	8.311.247.143	100,00	41.279.106.572	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						sesuai Aturan																
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12,00	12,00	68,00	8.311.247.143	68,00	8.311.247.143	68,00	8.034.118.000	68,00	8.311.247.143	68,00	8.311.247.143	68,00	41.279.106.572	
					KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	100,00	1.163.395.897	100,00	819.680.000	100,00	570.295.000	100,00	849.634.000	100,00	847.898.000	100,00	4.250.902.897	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12,00	12,00	12,00	74.873.000	12,00	82.360.000	12,00	90.596.000	12,00	99.656.000	12,00	109.622.000	12,00	457.107.000	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap	Unit			35,00	425.088.000	7,00	158.138.000	8,00	93.640.000	7,00	158.138.000	7,00	158.138.000	64,00	1.158.770.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perlengkapan Kantor	an Kantor yang Disediakan																
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			00	00	6,00	38.670.000	4,00	23.400.000	3,00	15.750.000	3,00	15.750.000	16,00	93.570.000	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12,00	12,00	12,00	139.550.000	12,00	191/610/000	12,00	190.692.000	12,00	210.226.000	12,00	210.238.000	12,00	977.866.000	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12,00	12,00	12,00	61.956.850	12,00	69.152.000	12,00	74.967.000	12,00	83.864.000	12,00	91.150.000	12,00	382.089.850	
					SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Bulan			12,00	79.750.047	12,00	199.750.000	12,00	85.000.000	12,00	210.000.000	12,00	195.000.000	12,00	889.500.047	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Konsultasi SKPD																
					SUB KEGIATAN : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			10,00	60.000.000	5,00	80.000.000	3,00	12.000.000	3,00	72.000.000	2,00	68.000.000	23,00	292.000.000	
					KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah (unit)	Unit			4,00	52.552.960	451,00	566.750.857	446,00	1.138.560.000	498,00	482.637.857	498,00	402.637.857	1.897,00	2.643.139.531	
					SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Unit			00	00	1,00	35.000.000	1,00	800.000.000	00	00	00	00	2,00	835.000.000	
					SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Unit			00	00	440,00	386.779.897	440,00	311.040.000	495,00	419.690.000	495,00	339.690.000	1.870,00	1.457.199.897	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit			4,00	52.552.960	5,00	64.970.960	2,00	3.520.000	2,00	67.138.000	2,00	62.947.857	15,00	251.129.177	
					SUB KEGIATAN : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit			00	00	1,00	50.000.000	00	00	00	00	00	00	1,00	50.000.000	
					SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Unit			00	00	4,00	30.000.000	3,00	24.000.000	00	00	00	00	7,00	54.000.000	
					KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100,00	2.188.218.000	100,00	2.252.354.000	100,00	1.727.800.000	100,00	1.774.105.000	100,00	1.829.539.000	100,00	9.772.016.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	291.390.000	12,00	350.529.000	12,00	352.582.000	12,00	38.7840.000	12,00	426.624.000	60,00	1.808.965.000	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	62,00	49.969.000	65,00	54.966.000	65,00	60.462.000	65,00	66.509.000	65,00	73.159.000	65,00	305.065.000	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	1.846.859.000	12,00	1.846.859.000	12,00	1.314.756.000	12,00	1.319.756.000	12,00	1.329.756.000	60,00	7.657.986.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100,00	1.779.714.000	100,00	1.733.815.000	100,00	1.868.326.000	100,00	2.347.353.857	100,00	2.112.846.000	100,00	9.842.054.857	
					SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			45,00	1.029.714.000	45,00	1.133.815.000	45,00	1.248.326.000	45,00	1.373.988.000	45,00	1.512.846.000	45,00	6.298.689.000	
					SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4,00	750.000.000	4,00	600.000.000	4,00	620.000.000	4,00	973.365.857	4,00	600.000.000	4,00	3.543.365.857	

Tabel 12
Target Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi pada Tahun Awal Perencanaan		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Retribusi Jasa Umum	396.250.000	287.300.000	255.000.000	65.000.000	71.500.000	78.500.000	84.965.000
-	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	40.500.000	54.050.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	355.750.000	233.250.000	210.000.000	15.000.000	16.500.000	18.500.000	19.965.000
2	Retribusi Jasa Usaha	209.716.000	129.010.000	372.500.000	372.500.000	384.000.000	384.000.000	439.000.000
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	182.316.000	110.860.000	342.500.000	342.500.000	348.000.000	348.000.000	398.000.000
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	27.200.000	18.150.000	29.000.000	29.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000
-	Retribusi Tempat Rekreasi	200.000	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Hasil dari Pemanfaatan Kakayaan Daerah	1.309.109.692	1.584.745.593	1.501.508.730	1.576.584.167	1.655.413.375	1.738.184.044	1.825.093.246
-	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa	1.309.109.692	1.584.745.593	1.501.508.730	1.576.584.167	1.655.413.375	1.738.184.044	1.825.093.246
	Jumlah	1.915.075.692	2.001.055.593	2.129.008.730	2.014.084.167	2.110.913.375	2.200.684.044	2.349.058.246

Tabel 12 merupakan Target Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2022 – 2026, dimana ada 3 (tiga) sumber pendapatan yaitu dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa.

Dari Retribusi Jasa Umum ada Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, untuk melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan penguburan/pemakaman Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyediakan lahan makam baru di Dukuh Perno, Desa Jatitengah, Kecamatan Sukodono. Hal itu dilakukan karena 2 (dua) makam yang terletak di Kecamatan Sragen yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen yaitu TPU Manding dan TPU SI sudah penuh. Sedangkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dengan diluncurkannya online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko maka target pendapatan mengalami penurunan di Tahun 2023.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi, untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (diantaranya Sewa Gedung Kartini dan Sewa Gedung SMS) target yang ditetapkan belum maksimal di tahun 2022 dan 2023 karena perkiraan masih adanya pandemi covid-19.

Sedangkan dari Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah/Sewa, diharapkan untuk tahun mendatang masih ada aset milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang dapat disewakan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten, Persentase Rumah Layak Huni dan Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani. Korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa penetapan program dan kegiatan dalam rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13

Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Indeks	N/A	85,00	87,00	88,00	90,00	92,00	92,00
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	0,58	0,85	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	43,43	43,65	58,82	78,98	94,15	94,31	94,31
	Persentase Rumah Layak Huni	%	86,87	87,31	87,64	87,97	88,30	88,62	88,62

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	100,00	0,00	30,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	N/A	21,00	23,00	20,00	19,00	17,00	17,00
	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi serta memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen dan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra serta menunjang tercapainya Visi Kabupaten Sragen 2021 – 2026 yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Sragen, 16 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN SRAGEN



R. SUPARWOTO, S.STP., M.Si.
NIP. 19780710 199703 1 001